



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

TAHUN 2016-2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Bima Tahun 2016-2020 dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Bima ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PU Kab. Bima untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) ini dibuat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Renstra Dinas PU Kab. Bima yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi Renstra Dinas PU Kab. Bima Tahun 2016-2020, yang diharapkan dapat terlaksana secara utuh meliputi komponen sumber daya manusia, pendanaan maupun komponen terkait lainnya serta mendapatkan dukungan dari semua pihak terkait, sehingga dapat meminimalkan dampak dari permasalahan yang mungkin timbul dalam upaya pencapaian program dan kegiatan yang ditetapkan.

Bima, Januari 2015
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bima,

Ir. H. NGGEMPO, MMT.
Nip. 19621221 199003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARError! Bookmark not defined.

DAFTAR ISI..... iii

BAB 1. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang **Error! Bookmark not defined.**

1.2. Landasan Hukum2

1.3. Maksud dan Tujuan3

1.4. Sistematika Penulisan4

BAB 2. GAMBARAN PELAYANAN SKPDError! Bookmark not defined.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD **Error! Bookmark not defined.**

2.2. Sumber Daya SKPD 10

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan SKPD..... 13

BAB 3. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI..... 19

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas
dan Fungsi Pelayanan SKPD.....19

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 22

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Provinsi/Kabupaten/Kota.....25

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis30

BAB 4. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI..... 35

4.1. Visi dan Misi SKPD35

4.2. Strategi dan Kebijakan37

**BAB 5. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
DAN KELOMPOK SASARAN**..... 40

BAB 6. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	43
BAB 7. PENUTUP	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu elemen dalam menciptakan *good governance* (kepemerintahan yang baik) adalah akuntabilitas. Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah diharuskan melaksanakan Akuntabilitas Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Langkah awal akuntabilitas kinerja adalah penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) tentang program - program utama yang akan dicapai satu sampai lima tahun kedepan.

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan kekuatan (*strength*) kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threath*). Perencanaan strategis ini diharapkan akan menjadi landasan operasional suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam mencapai tujuan.

Dinas Pekerjaan Umum sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Bima, berkewajiban pula untuk menyusun Perencanaan Strategis dalam Periode waktu 2016-2020.

Dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi,

penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima berpedoman pada rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima tahun 2011-2015, dengan tetap mendasar pada kondisi dan potensi daerah serta aspirasi yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Dengan demikian akan terjalin keterkaitan (*linkage*) dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi dan terdapat kesesuaian dengan kondisi dan potensi daerah serta aspirasi masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi serta kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD meliputi:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional..
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
5. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang berisikan pedoman dalam rangka memantapkan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang akuntabel dan terwujudnya Good Governance.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bima.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2010-2014.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perkerjaan Umum Tahun 2016-2010 adalah sebagai arahan dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur urusan bidang pekerjaan umum, bidang penataan ruang dan lain-lain di Kabupaten Bima sehingga pelaksanaan pembangunan urusan terkait bisa dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima Tahun 2016-2020 disusun dengan tujuan untuk:

- a. Menjabarkan visi dan misi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2016-2020;
- b. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pada tahun 2016-2020.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima Tahun 2016-2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.2. Visi dan Misi SKPD
- 4.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.4. Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN KELOMPOK SASARAN

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

Dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah di bidang pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang dan energi sumberdaya mineral, terdapat urusan yang akan dilaksanakan daerah, dekonsentrasi dan tugas-pembantuan dari pemerintah pusat untuk kegiatan yang bersifat fisik, khususnya untuk sub bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, dan bidang Penataan Ruang. Sebagaimana telah digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Provinsi sebagaimana telah diatur sebagai berikut :

- 1) Urusan perumahan merupakan urusan wajib pemerintah daerah terdiri dari sub bidang pembiayaan, perumahan formal, perumahan swadaya, pengembangan kawasan dan pembinaan hukum, peraturan perundang-undangan dan pertanahan. Urusan wajib melekat pada urusan dalam skala provinsi;
- 2) Urusan penataan ruang, merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang terdiri dari sub bidang pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan. Urusan wajib melekat pada urusan dalam skala provinsi;
- 3) Urusan pekerjaan umum, merupakan urusan wajib

pemerintah daerah yang terdiri dari sub bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya (perkotaan dan perdesaan, air minum, air limbah, persampahan, drainase, permukiman, bangunan gedung dan lingkungan) dan jasa konstruksi;

Sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2010 sebagai Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima secara prinsip melaksanakan tugas sebagai berikut :

A. Tugas Pokok

Membantu Bupati dalam menyusun Rencana Teknis Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Pembinaan Umum Bimbingan, Perizinan, Operasi dan Pemeliharaan.

B. Fungsi

- a. Mengumpulkan data sebagai bahan perumusan kebijaksanaan Pekerjaan Umum dan Prasarana Pemukiman Wilayah, Perencanaan dan Pelaksanaan Teknis Pembangunan, pengembangan dan pengelolaan, pembinaan Umum bimbingan dan perijinan, operasi dan pemeliharaan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.
- b. Menyusun rencana teknis pembangunan, pengembangan dan pengelolaan pelaksanaan pembangunan serta penyuluhan.
- c. Mengawasi dan mengendalikan teknis dibidang Pekerjaan Umum Prasarana Wilayah dan Pemukiman

sesuai kebijaksanaan dan pedoman yang telah ditetapkan.

- d. Mengevaluasi dan mengendalikan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum dan Pemukiman sesuai kebijaksanaan dan pedoman yang telah ditetapkan.
- e. Menyebarluaskan pembinaan informasi dibidang Pekerjaan Umum, Prasarana Wilayah dan Pemukiman.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Menurut PERDA Nomor 13 Tahun 2000 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris terdiri dari :
 - Sub Bidang Umum
 - Sub Bidang Kepegawaian
 - Sub Bidang Keuangan
 - Sub Bidang Program
- c. Bidang Tata Ruang dan Program terdiri dari :
 - Sub Bidang Ruang dan Perencanaan Umum
 - Sub Bidang Program dan Anggaran
 - Sub Bidang Kemitraan dan Pengembangan Jasa Kontruksi
 - Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Dinas Pengairan terdiri dari :
 - Sub Bidang Pembangunan Irigasi
 - Sub Bidang Perencanaan Teknik
 - Sub Bidang Operasi dan Pemeliharaan
 - Sub Bidang Bina Manfaat

e. Bidang Bina Marga terdiri dari :

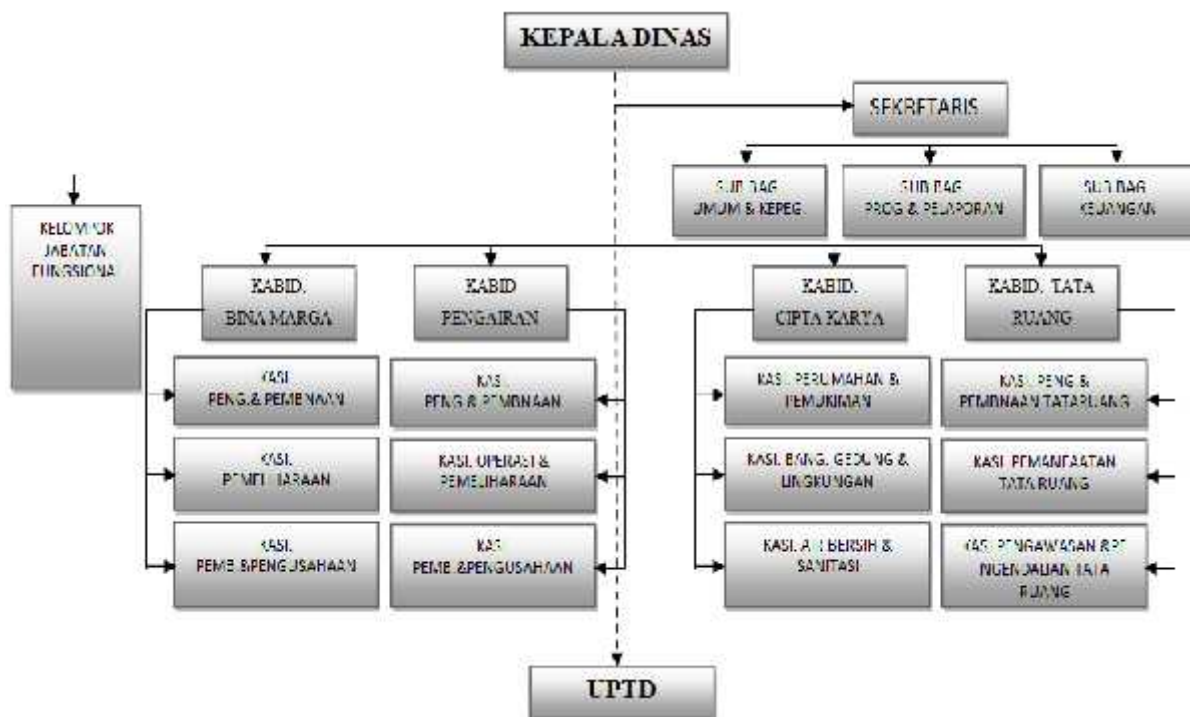
- Sub Bidang Perencanaan Teknis
- Sub Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan
- Sub Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- Sub Bidang Bina Manfaat dan Pengawasan Teknik

f. Bidang Cipta Karya terdiri dari :

- Sub Bidang Perencanaan Teknis dan Pengembangan Wilayah
- Sub Bidang Tata Bangunan
- Sub Bidang Pengembangan Permukiman dan Perumahan
- Sub Bidang Pengembangan Perkotaan

g. Kepala Cabang Dinas Kecamatan

Sedangkan unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima, terdiri dari Pimpinan, Pembantu Pimpinan dan Pelaksana dengan Struktur Organisasi sebagaimana Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima

2.2. SUMBER DAYA SKPD

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima per 1 Januari 2015 ada 454 Orang, yang apabila dikategorikan berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan, pendidikan dan gender sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.1. dan Tabel 2.2.

Tabel 2.1. : Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan

No	Gol	Jumlah SDM (Orang)				Jumlah
		a	B	C	D	
1	IV	2	1	1		4
2	III	13	34	21	6	74
3	II	4	58	25	6	93
4	I	3	7	5	2	17
Jumlah						188

Tabel 2.2. : Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Tingkat pendidikan PNS	Jumlah PNS		Ket
		Struktural	Fungsional	
1	S3	-		
2	S2	8		
3	S1	20		
4	Diploma sederajat	1		
5	SLTA sederajat	2		
6	SMP sederajat	-		
7	SD sederajat	-		
	Jumlah	31		

2.2.2. Aset Yang Dikelola

Aset yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima per 1 Januari 2015 berdasarkan Buku Induk Inventaris, dalam pelayanan masyarakat, berupa kantor, kendaraan dinas kendaraan operasional, dan perlengkapan kantor dengan rincian jenis aset terlihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Rekapitulasi Peralatan Dan Mesin Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima Tahun 2014

NO	JENIS BARANG	KEADAAN			JUMLAH (unit)
		BAIK	RR	RB	
1	2	3	4	5	6
1	Komputer	20	4	7	31
2	Laptop	30			30
3	Kamera Digital	8			8
4	Handy Cam	5			5
5	Air Conditioner	5			5
6	Mobil Pejabat	4			4
7	Kendaraan Operational	2			2
8	Dum Truk	5	1		6
9	Kendaraan Roda Dua	7			7
10	Asphalt Mixer Plant (AMP)	1			1
11	Battery Charger			2	2
12	Dongkrak Buaya			2	2
13	Dongkrak Hidrolik			1	1
14	Excavator	2			2
15	Generator Set	1			1
16	Generator			1	1
17	Kaki Tiga	1			1
18	Katrol			1	1
19	Motor Grager	1			1
20	Mesin Bor Duduk		1		1
21	Mesin Gerindra	1			1
22	Three Wheel Roller			2	2
23	Thundem Roller	1		1	2
24	Arc-Welder		1		1
25	Vibrator Roller	1			1
26	Wheel Loader	1			1
27	Tronton	1			1
28	Molen (Concrete Mixer)	1			1
29	Stamper	1			1
30					

2.3. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Selanjutnya tantangan masing-masing bidang urusan penataan ruang, pekerjaan umum, perumahan dan energi & sumber daya mineral diuraikan di bawah ini.

2.3.1. Tantangan pembangunan bidang penataan ruang

Tantangan pembangunan bidang penataan ruang, Meliputi :

1. Melengkapi peraturan perundang-undangan dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang untuk mendukung implementasi penataan ruang di lapangan, khususnya Kab. Bima
2. Meningkatkan pemanfaatan Rencana Tata Ruang secara optimal dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, peningkatan daya dukung wilayah, dan pengembangan kawasan.
3. Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang terutama melalui dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang di daerah untuk mengurangi terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor, antar wilayah, dan antar pelaku.
4. Meningkatkan kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
5. Meningkatkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat (termasuk perempuan) dalam penyelenggaraan penataan ruang.

2.3.2. Tantangan pembangunan Bidang Sumber Daya Air (SDA)

Tantangan pembangunan Bidang Sumber Daya Air (SDA) meliputi :

1. Mengendalikan ancaman ketidakberlanjutan daya dukung SDA, baik untuk air permukaan maupun air tanah sebagai dampak dari laju *deforestasi* dan eksplorasi air tanah yang berlebihan yang telah menyebabkan *land subsidence* dan *intrusi* air asin/laut.
2. Menyediakan air baku untuk mendukung penyediaan air minum. Penyediaan air baku untuk mendukung penyediaan air minum belum dapat mencukupi sepenuhnya dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi target *Millennium Development Goals* (MDGs) yang menetapkan bahwa pada tahun 2015 separuh dari jumlah penduduk Indonesia harus dapat dengan mudah mengakses air untuk kebutuhan air minum.
3. Menyeimbangkan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air di berbagai sektor kehidupan, agar air yang berlimpah di musim hujan selama 5 bulan dapat digunakan untuk memasok kebutuhan air pada musim kemarau yang berlangsung selama 7 bulan.
4. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi
5. Melakukan pengelolaan resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti banjir, kekeringan, serta abrasi pantai.
6. Melakukan upaya dan langkah mitigasi dan adaptasi bidang SDA dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim.

2.3.3. Tantangan pembangunan Bidang ke Bina Marga-an

Tantangan pembangunan bidang Jalan meliputi :

1. Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang mendukung sistem transportasi wilayah harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan dalam menunjang sektor riil dan sistem logistik daerah dan nasional.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia.
3. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana jalan yang ada.
4. Menjaga keseimbangan pembangunan antar wilayah.
5. Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai pengungkit dan pengunci dalam pengembangan wilayah di antara berbagai gangguan bencana alam, maupun kesalahan penggunaan dan pemanfaatan jalan, disamping juga memenuhi kebutuhan aksesibilitas kawasan produksi dan industri serta outlet.
6. Mengantisipasi pertumbuhan prosentase kendaraan dibandingkan jalan yang terus akan mengalami peningkatan seiring perkembangan dan kompetisi global.
7. Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan transportasi dan penyelenggaraan jalan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan jalan.

2.3.4. Bidang ke Cipta Karya-an

Tantangan pembangunan bidang ke-Cipta Karya-an meliputi :

1. Perlunya menetapkan target-target kinerja yang lebih jelas untuk meningkatkan kinerja TPA yang berwawasan lingkungan.
2. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang masih rendah, sementara konflik sosial yang berkaitan dengan pengelolaan TPA sampah sampai saat ini masih sering terjadi di samping ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang masih belum memadai.
3. Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil hingga wilayah yang lebih luas dalam satu wilayah administrasi maupun antar kabupaten/kota dan provinsi.
4. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.
5. Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing sebuah kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan.
6. Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana air minum.
7. Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum.
8. Meningkatkan keandalan bangunan baik terhadap gempa

maupun kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi/perizinan.

9. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan gedung memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya kekumuhan dan banjir.
10. Mendorong penerapan konsep gedung ramah lingkungan (*green building*) untuk mengendalikan penggunaan energi sekaligus mengurangi emisi gas dan efek rumah kaca dalam kerangka mitigasi dan adaptasi terhadap isu pemanasan global.
11. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang khususnya pemanfaatan ruang bagi permukiman.
12. Melanjutkan program pengembangan kawasan agropolitan.
13. Mengupayakan pengarusutamaan jender dalam proses pelaksanaan kegiatan sub-bidang infrastruktur permukiman, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.
14. Mengupayakan pengarusutamaan jender dalam proses pelaksanaan kegiatan sub-bidang infrastruktur permukiman, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.

2.3.5. Sekretariat Dinas

Tantangan Sekretaris Dinas meliputi :

1. Peningkatan kebutuhan pembangunan infrastruktur berbagai wilayah dan kualitas pelayanannya kepada masyarakat membutuhkan SDM yang handal.
2. Reformasi birokrasi dalam rangka mencapai 3 (tiga) *strategic goals* yaitu: kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, kontribusi bagi peningkatan

kesejahteraan masyarakat, dan kontribusi bagi peningkatan kualitas lingkungan.

3. Peningkatan peran koordinasi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum antartingkatan pemerintahan dan antarpelaku pembangunan.
4. Penyelenggaraan *good governance* yang efektif untuk mengimbangi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan.
5. Pengembangan kapasitas SDM untuk mendukung perubahan peran ke depan yang diharapkan berubah dari yang semula lebih dominan sebagai operator-regulator menjadi dominan regulator-fasilitator.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima Tahun 2016-2020, adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Lima tahun pertama dan kedua Renstra Dinas PU Kab. Bima telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisahkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam

mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan, diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap Bidang/UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2011-2015.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

1. Sekretariat

- a. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal.
- b. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat.
- c. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Dinas PU Kab. Bima, dan UPTD Dinas PU Kab. Bima belum optimal.
- d. Belum optimalnya data dan informasi Dinas PU Kab. Bima yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- e. Peran aktif Dinas PU Kab. Bima sebagai perpanjangan tangan Bupati selaku wakil pemerintah daerah di Kab. Bima masih perlu ditingkatkan.

2. Bidang Tata Ruang

- a. Belum sepenuhnya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima menjadi acuan dalam penyusunan program-program pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang sesuai rencana tata ruang.
- b. Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan lain.

3. Bidang Keairan

- a. Terdapat defisit imbangan air irigasi pada beberapa Water District di musim kemarau serta bangunan irigasi yang sudah berumur.
- b. Belum terpenuhinya target penambahan air baku dikarenakan kewenangan penanganan tidak sepenuhnya berada di daerah.
- c. Kurangnya optimalnya koordinasi antar wilayah dalam pe-ngelolaan SDA yang menyebabkan konservasi SDA belum optimal serta Daya dukung lingkungan yang menurun akibat pemanfaatan sumber daya air yang berlebihan.

4. Bidang Bina Marga

Belum seluruhnya jalan dan jembatan di daerah Kabupaten Bima dalam kondisi mantap.

5. Bidang Cipta karya
 - a. Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang layak,
 - b. Belum optimalnya peran kabupaten/kota dalam menyadarkan masyarakat tentang pengelolaan air limbah yang benar
 - c. Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas masyarakat miskin di perdesaan, dikarenakan keterbatasan anggaran Daerah.
6. UPTD PU. Kabupaten Bima
Keterbatasan SDM, peralatan teknis, dan pendukung lainnya.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas PU Kab. Bima yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bima tersebut.

Hasil identifikasi Dinas PU Kab. Bima tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas PU Kab. Bima yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas PU Kab. Bima. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja

berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

a. Visi

Visi Merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (*level of living*) masyarakat.

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Bima merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2011-2015 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD.

Visi, Misi dan Program Calon Bupati Kabupaten Bima Tahun 2016-2010 yang pernah disampaikan adalah langkah merasionalisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang lebih berorientasi kepada kepentingan rakyat, merupakan langkah bijak yang ingin dilakukan oleh Bupati Bima. Langkah tersebut yaitu mengalokasikan anggaran kepada kepentingan rakyat seperti membangun infrastruktur Kantor Pemerintahan Kabupaten Bima di Kecamatan Woha. Serta sebagai upaya mendukung program nasional Swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo akan ditindak lanjuti dengan melakukan pencaanangan gerakan perbaikan irigasi yang

dipusatkan di So Dore Desa Samili Kecamatan Woha. Semoga Langkah ini bisa memenuhi ekspektasi publik dalam membangun **Dou Labo Dana Mbojo** kearah yang lebih baik lagi kedepannya.

2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengembangkan pendidikan yang berkarakter yang didukung dengan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya.
2. Memperkuat perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif disertai peningkatan daya saing pariwisata guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik ke arah katalisator yang mampu mengelola pemerintahan secara efisien, efektif, mampu menggerakkan dan mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri.
4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang.

Dari keempat Kab. Bima tersebut di atas, maka misi keempat adalah misi yang harus di emban Dinas Pekerjaan Umum. Misi keempat tersebut dimaknai sebagai upaya untuk memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.

3.3. TELAHAH RENSTRA KEMENTERIAN DAN RENSTRA PEMERINTAH DAERAH

Telaahan terhadap Renstra Kementerian dan Renstra Daerah diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas PU Kab. Bima yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikaitkan dengan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Dinas PU Kab. Bima adalah Dinas daerah yang mempunyai hubungan dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Pada bagian ini akan ditelaah Renstra kementerian tersebut kaitannya dengan Renstra di daerah kabupaten/kota pada tahun yang sama, adapun telaahnya adalah sebagai berikut :

3.3.1. Telaah Renstra pada Kementerian Pekerjaan Umum

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 23/PRT/M/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian pekerjaan Umum tahun 2010 – 2014.

3.3.1.1. Kondisi Pekerjaan Umum

Kondisi yang dikemukakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang mempengaruhi kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta di

antaranya adalah :

- a. Menurunnya fungsi jaringan irigasi, disebabkan oleh tingginya tingkat kerusakan karena umur konstruksi, bencana alam dan kurang optimalnya kegiatan operasi dan pemeliharaan di samping rendahnya keterlibatan petani dan *stakeholders* lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi, sehingga menurunnya kinerja layanan jaringan irigasi yang ada dalam mendukung pemenuhan produksi pangan.
- b. Berkembangnya daerah permukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air.
- c. Target tingkat pelayanan air minum saat ini belum mampu terpenuhi, termasuk kualitas air minum PDAM yang masih belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- d. Pada subbidang persampahan, pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih rendah. Pembuangan Akhir (TPA) masih rendah. Sementara upaya meningkatkan kinerja TPA yang berwawasan lingkungan di Perkotaan Yogyakarta sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.
- e. Dalam penanganan air limbah jumlah keluarga yang memiliki akses terhadap sarana sanitasi dasar meningkat, namun pencapaian tersebut masih sebatas pada akses ke jamban dan toilet saja.
- f. Untuk penanganan bangunan gedung dan lingkungan, telah diupayakan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, dan melalui kegiatan sosialisasi/diseminasi peraturan bidang bangunan gedung dan lingkungan. Kondisi

saat ini juga mencatat telah tersusunnya perda tentang bangunan gedung di Kabupaten/Kota di DI Yogyakarta.

- g. Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah masih menjadi permasalahan, Sementara itu setiap tahun terjadi penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru.
- h. Dalam pelaksanaan pemanfaatan Rencana Tata Ruang (RTR). Hal ini mengingat masih sering terjadinya pembangunan pada suatu wilayah tanpa mengikuti RTR, akibat masih lemahnya pengendalian dan penegakan hukum di bidang penataan ruang.
- i. Implementasi kebijakan pembinaan jasa konstruksi selama 8 tahun terakhir, dalam konteks mikro (tatakelola pemerintahan yang baik), konteks meso (usaha dan perusahaan konstruksi), serta konteks makro (kerjasama, persaingan global dan liberalisasi jasa konstruksi) belum mencapai sasaran sebagaimana diamanatkan dalam UU 18/1999. Bidang jasa konstruksi saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan seputar lemahnya penguasaan teknologi, sulitnya akses ke permodalan, serta masih kerap terjadi kegagalan bangunan, kegagalan konstruksi, dan mutu konstruksi yang belum sesuai standar.

3.3.1.2. VISI Kementerian Pekerjaan Umum

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum diselenggarakan dalam rangka mencapai visi jangka panjang:

“Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025”.

Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2025, dimana

infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.

3.3.1.3. MISI Kementerian Pekerjaan Umum

Misi untuk mencapai Visi kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010 – 2014, yaitu:

1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
2. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air.
3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan.
5. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang.

6. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan: IPTEK, norma, standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur PU dan permukiman.
7. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.
8. Meminimalkan penyimpangan dan praktik-praktik KKN di lingkungan Kementerian PU dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengawasan profesional

3.3.1.4. Tujuan

Sebagai penjabaran atas visi, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian PU dalam periode 2010-2014 adalah:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur PU dan permukiman, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim).
2. Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan pangan dan daya saing.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (dasar) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan pembangunan strategis, wilayah tertinggal perbatasan, dan penanganan rawan bencana untuk kesenjangan antar wilayah.
5. Optimalisasi peran (koordinasi, sistem informasi, data, SDM,

kelembagaan dan administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.

3.3.1.5. Sasaran

Sasaran strategis Kementerian PUDalam periode 2010-2017 secara keseluruhan meliputi sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam setiap penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) serta penerbitan Peraturan Presiden tentang RTR Pulau / Kepulauan dan peraturan pendukungnya berupa Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria NSPK bidang penataan ruang sesuai amanat RTRWN.
2. Meningkatnya ketersediaan air baku yang memadai (kuantitas, kualitas, dan kontinuitas) guna pemenuhan berbagai kebutuhan baik untuk pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum guna mendukung target MDGs 2015, maupun kebutuhan pertanian dalam rangka mempertahankan swasembada pangan serta kebutuhan sektor-sektor untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi melalui pembangunan / peningkatan / rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bendungan, waduk / embung / bangunan penampung air lainnya serta prasarana penyediaan air baku, jaringan irigasi dan jaringan rawa.
3. Meningkatnya kualitas pengendalian banjir secara terpadu dari hulu ke hilir dalam satu wilayah dan perlindungan kawasan di sepanjang garis pantai dari bahaya abrasi.
4. Meningkatnya efisiensi sistem jaringan jalan di dalam sistem

transportasi yang mendukung perekonomian nasional dan sosial masyarakat serta pengembangan wilayah melalui preservasi dan peningkatan kapasitas jalan lintas wilayah serta pembangunan Jalan Tol Trans Jawa.

5. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman melalui pengembangan sistem jaringan penyediaan air minum untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan, serta meningkatnya pelayanan sanitasi sistem terpusat dan sistem berbasis masyarakat bagi penduduk perkotaan, meningkatnya sistem pengelolaan drainase untuk mendukung pengurangan luas genangan di perkotaan serta meningkatnya sistem pengelolaan persampahan untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk, dan meningkatnya kualitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, serta penerapan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di perkotaan.
6. Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dan stakeholders jasa konstruksi serta masyarakat untuk mendukung tercapainya penguasaan pangsa pasar domestik oleh pelaku konstruksi nasional serta pengurangan jumlah dan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan akibat kegagalan konstruksi / bangunan melalui peningkatan sistem pembinaan teknis dan usaha jasa konstruksi.

3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang

harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Kab/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas PU adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Dinas PU diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas PU di masa lima tahun

mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut :

3.4.1. Isu Strategis Bidang Penataan Ruang

1. Perlunya peningkatan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendali dan pengawas pemanfaatan ruang, agar maupun di daerah, untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin berkualitas dalam rangka pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang efektif.
2. Perlu upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai melalui pendekatan sosial budaya guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang, baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.

3.4.2. Isu strategis Bidang Keairan

1. Perubahan garis pantai akan menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan perlindungan sarana dan prasarana sepanjang pantai dan batas wilayah Negara. Mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur SDA yang mengalami kerusakan karena bencana alam seperti banjir, dan gempa bumi. Menyelenggarakan pembinaan yang lebih intensif kepada pemerintah daerah dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan irigasi.
2. Mempertahankan kemampuan penyediaan air dari sumber-sumber air dari dampak berkurangnya areal terbuka hijau dan menurunnya kapasitas wadah-wadah air baik alamiah maupun buatan dengan cepat.
3. Meningkatkan koordinasi dan ketatalaksanaan penanganan SDA untuk mengurangi konflik antar pengguna sumber daya

air.

4. Meningkatkan kinerja pengelolaan Sistem Informasi SDA (SISDA) pada Dinas PU dan melengkapi data dan informasi tentang SDA untuk dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan serta memperluas akses publik terhadap data dan informasi SDA.
5. Mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan bidang SDA, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.
6. Mencari peluang-peluang investasi baru dalam upaya pengembangan infrastruktur SDA.

3.5.3. Isu strategis Bidang Bina Marga

1. Meningkatkan / mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan di tengah-tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan.
2. Meningkatkan koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara penyelenggaraan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota serta penyelenggaraan regulasi, kelembagaan, pembagian kewenangan, dan perijinan pemanfaatan ruang jalan (ruang manfaat, ruang milik, ruang pengawasan jalan, dan kawasan di sepanjang koridor jaringan jalan).

3.5.4. Isu strategis Bidang ke Cipta Karya

1. Kerusakan lingkungan hidup
Meningkat dan tidak terkendalinya penggunaan ruang dan sumber daya alam di permukaan, di bawah dan di atas tanah.
2. Perubahan iklim dan bencana alam

Meningkatnya temperatur rata-rata bumi dan meningkatnya permukaan air laut menimbulkan bahaya banjir.

3. Posisi Indonesia yang berada di kawasan *ring of fire* memerlukan perencanaan permukiman yang terarah dan berkelanjutan.
4. Modal sosial
 - a. Penduduk dan kekayaan bangsa merupakan potensi modal sosial.
 - b. Jika aspek modal sosial tidak diperhitungkan, maka investasi yang dilakukan tidak mendorong peningkatan kesejahteraan.

BAB IV

VISI, MISI, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI SKPD

4.1.1. Visi

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan.

Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (*level of living*) masyarakat. Sehingga perubahan paradigma pembangunan yang muncul adalah lebih banyak menaruh perhatian untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, rasa ketidakterlindungi, rasa terpinggirkan dan ditinggirkan, rasa terkucil dan di kucilkan, mengatasi ketidakadilan lingkungan, baik terhadap sumberdaya alam, tata ruang, maupun permukiman.

Secara spesifik, penjabaran dari visi SKPD Kab. Bima ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Kabupaten Bima adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bima yang mencakup 18 (delapan belas) Wilayah Kecamatan dan Seluruh Desa dan Dusun yang berada dibawahnya.
2. Maju dalam Bidang Infrastruktur ditandai dengan adanya kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan baik peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan produksi dan produktivitas, sumber daya, derajat kesehatan dan masyarakat veteriner.

3. Pengembangan Sistem berdaya saing ditandai dengan Pemberdayaan masyarakat dan berkembangnya ekonomi rakyat sebagai pelaku agribisnis, terciptanya peluang pasar, menguatnya kelembagaan usaha tani, diterapkan IPTEK dan manajemen ekonomi modern dalam kegiatan agribisnis.
4. Berkeadilan ditandai dengan adanya kesempatan berusaha yang seluasnya – luasnya dan keseimbangan antara kebijakan pemerintah untuk memberikan peluang terhadap usaha kecil dan menengah untuk berusaha.
5. Berkelanjutan dicirikan oleh kemampuan mengembangkan usaha dan memenuhi permintaan pasar secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan kemampuan dan kelestarian sumber daya alam serta lingkungan hidup.

4.1.2. MISI

Dengan menyediakan sarana prasarana permukiman wilayah yang serasi seimbang dan berwawasan lingkungan serta dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima dirumuskan sebagai berikut :

- a. Mendorong Inovasi teknologi spesifik lokasi yang ramah lingkungan dalam rangka mewujudkan sistem usaha yang berdaya saing, berkeadilan dan berkelanjutan.
- b. Menyediakan infrastruktur yang berkecukupan baik kualitas maupun kuantitasnya.
- c. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pelayanan yang Prima kepada masyarakat.
- d. Memberdayakan masyarakat dalam mengembangkan mekanisme pasar dan keunggulan komparatif wilayah.

- e. Meningkatkan Kualitas SDM dan Kelembagaan agar mampu mengelola potensi ekonomi dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah.

4.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mengoptimalkan kekuatan dan peluang sebagai factor kunci keberhasilan yang dimiliki dan mengurangi kelemahan maupun ancaman dalam mewujudkan visi, misi, maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima menerapkan strategi dan pendekatan sebagai berikut :

4.2.1. STRATEGI UTAMA

Beberapa pendekatan yang dilakukan adalah

1. Mengadakan peralatan dan pemeliharaan kantor.
2. Mengikut sertakan aparatur untuk mengikuti diklat dan kursus.
3. Menyediakan dokumen perencanaan umum kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima.
4. Pembangunan/Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ke Daerah Terisolir dan Sentra Produksi untuk menunjang aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa.
5. Pembangunan dan Pemeliharaan Embung dan Saluran Irigasi.
6. Penataan Lingkungan perumahan permukiman dan Pembangunan sarana dan Prasarana Air Bersih serta Perbaikan Perumahan dan Permukiman.

4.2.2. PENDEKATAN

Beberapa pendekatan yang dilakukan adalah :

1. Penerapan sistim perencanaan, program tahunan
2. Berbasis pada kemampuan Sumber Daya Manusia Lokal

3. Dilaksanakan secara partisipatif oleh berbagai lapisan masyarakat

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka Kebijakan Pembangunan Prasarana Sarana Dasar Pekerjaan Umum (PSD-PU) diarahkan pada upaya untuk berkembangnya sistim dan usaha jasa konstruksi yang berdaya saing tinggi, memadai, berkelanjutan dan desentralistik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima menetapkan Visi dan Misi, maka Kebijakan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima tahun 2016-2010 diarahkan pada upaya-upaya :

1. Pembuatan Rencana Teknik Tata Ruang dan Prasarana Wilayah.
2. Penyediaan Jaringan Jalan dan Jembatan.
3. Penyediaan dan Pelayanan Air untuk Irigasi.
4. Penyediaan Prasarana Lingkungan Perumahan dan menambah jaringan Air Bersih.
5. Memberikan pelayanan prima pada masyarakat.
6. Membuka daerah terisolir dan mempermudah jangkauan ke sentra produksi.
7. Meningkatkan hasil produksi pertanian dengan pembangunan jaringan irigasi teknis dan pelestarian sumber daya alam.
8. Menciptakan kawasan yang serasi seimbang dan berwawasan lingkungan.
9. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menciptakan lingkungan bersih dan sehat.

4.2.3. ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka Kebijakan Pembangunan Prasarana Sarana Dasar Pekerjaan Umum (PSD-PU) diarahkan pada upaya untuk berkembangnya sistim dan usaha jasa konstruksi yang berdaya saing tinggi, memadai, berkelanjutan dan desentralistik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima menetapkan Visi dan Misi, maka Kebijakan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima tahun 2016-2010 diarahkan pada upaya-upaya :

1. Pembuatan Rencana Teknik Tata Ruang dan Prasarana Wilayah.
2. Penyediaan Jaringan Jalan dan Jembatan.
3. Penyediaan dan Pelayanan Air untuk Irigasi.
4. Penyediaan Prasarana Lingkungan Perumahan dan menambah jaringan Air Bersih.
5. Memberikan pelayanan prima pada masyarakat.
6. Membuka daerah terisolir dan mempermudah jangkauan ke sentra produksi.
7. Meningkatkan hasil produksi pertanian dengan pembangunan jaringan irigasi teknis dan pelestarian sumber daya alam.
8. Menciptakan kawasan yang serasi seimbang dan berwawasan lingkungan.
9. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menciptakan lingkungan bersih dan sehat.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN KELOMPOK SASARAN

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.

5.2. Sasaran program

Program Prasarana Sarana Dasar Pekerjaan Umum (PSD-PU) memiliki sasaran pokok pembangunan yaitu :

- a. Tersedianya sumber daya apatur yang memadai
- b. Terkendalinya Pembangunan sarana dan prasarana
- c. Tertatanya Ibukota Kecamatan Pemekaran dengan membuat Rencana Teknik Tata Ruang Ibukota Kecamatan
- d. Tertibnya penataan lingkungan pemukiman dengan adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan tersedianya air bersih, lingkungan yang tertata rapi serta dapat mengalirkan air limbah.
- e. Pembangunan jalan dan jembatan kedaerah yang terisolir dan kedaerah sentra produksi

- f. Pembangunan jaringan irigasi dan konservasi sumberdaya air dengan mengembalikan fungsi jaringan irigasi dari 60 % menjadi maksimal 80 %.

5.3. Permasalahan dan Akar Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima adalah :

- a. Rendahnya kemampuan Pengusaha Jasa Konstruksi untuk bersaing dipasar Nasional maupun Internasional
- b. Rendahnya kualitas hasil pelaksanaan konstruksi, sehingga belum dapat meyakinkan pasar/konsumen.
- c. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan
- d. Terbatasnya sarana operasional kegiatan sehingga menghambat dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan dilapangan

5.4. Indikator Kinerja Program

Dibawah ini digambarkan indikator kinerja program pengembangan Prasarana Sarana Dasar Pekerjaan Umum (PSD-PU) Kab. Bima sebagai berikut :

- a. Tersedianya Dokumen Perencanaan sebagai pedoman
- b. Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi dan memudahkan pengangkutan barang dan jasa.
- c. Tersedianya sarana dan prasarana pengairan
- d. Terciptanya keindahan lingkungan
- e. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dan pelaku usaha pembangunan jaringan jalan dan jembatan serta jaringan irigasi.

- f. Meningkatnya efisiensi pemanfaatan sumberdaya pekerjaan umum dengan membuka daerah-daerah terisolir
- g. Meningkatnya Produksi pertanian dengan terbangunnya Daerah Irigasi.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarnya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Dinas PU Kab. Bima untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas PU Kab. Bima, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi infrastruktur pekerjaan umum.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator

kinerja pada saat membuat perencanaan.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas PU Kab. Bima yang termuat dalam dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2015 – 2020.

BAB VII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah 2016-2010 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana yang diamanatkan dalam Keputusan Bupati Bima Nomor 47 Tahun 2001.

Dokumen Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyelesaian tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan dapat menjadi alat ukur kinerja pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima yang diimplementasikan dalam arah kebijakan, program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun diperlukan manajemen pengelola sumber daya yang ada secara optimal sehingga mampu memberikan kontribusi yang diharapkan. Komitmen, kerja keras, kerjasama, dan konsisten untuk menyelesaikan tugas dasar dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bima, merupakan faktor pendukung utama keberhasilan penerapan konsep-konsep strategis dalam pembangunan jangka menengah.

Bima, Januari 2015
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bima,

Ir. H. NGGEMPO, MMT.
Nip. 19621221 199003 1 003